



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2024 -2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**KECAMATAN SUKODONO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karuniaNya sehingga terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sesuai harapan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Sukodono, Mei 2023  
CAMAT SUKODONO



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
<b>I. BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Manusia	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	22
2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	22
2.7 Kerjasama Perangkat Daerah	22
<b>III. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Isu Strategis	25
<b>IV. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>26</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran	26
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	29
<b>V. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>38</b>
<b>VI. BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>41</b>
<b>VII. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>63</b>
7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	63
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	64
<b>VIII. BAB VIII PENUTUP</b>	<b>68</b>

## **LAMPIRAN**

2.1	Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono	9
2.1	Tabel Daftar Pegawai ASN Kantor Kecamatan Sukodono	16
2.2	Tabel Daftar Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Gol.	17
2.3	Tabel Daftar Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
2.4	Tabel TC 23	19
2.5	Tabel TC 24	20
3.1	Tabel TB 35	24
4.1	Tabel TC 25	28
5.1	Tabel TC 26	40
6.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
6.2	Tabel TC 27	44
7.1	Tabel TC 28	65

**1.1 LATAR BELAKANG**

Pengembangan pembangunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat beserta Instansi Terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sukodono untuk Tahun 2024-2026 ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Sukodono mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Sukodono dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berlaku selama tiga Tahunan maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berlaku satu Tahunan.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun ke depan. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra PD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 - 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
30. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga Tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Sukodono dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra**

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sukodono sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Lumajang.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 3 (tiga) Tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Lumajang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 3 (tiga) Tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Perda tentang RPD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukodono Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Sukodono dalam rentang Tahun 2024-2026.
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukodono dalam rentang Tahun 2024-2026.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Kecamatan Sukodono diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Sukodono
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sukodono
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

##### **BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

##### **BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan & Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

##### **BAB V            STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI            RENCANA        PROGRAM,        KEGIATAN        DAN        SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII           KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

##### **BAB VIII        PENUTUP**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan, hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
2. Kepala Kecamatan disebut Camat;
3. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
4. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
5. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga

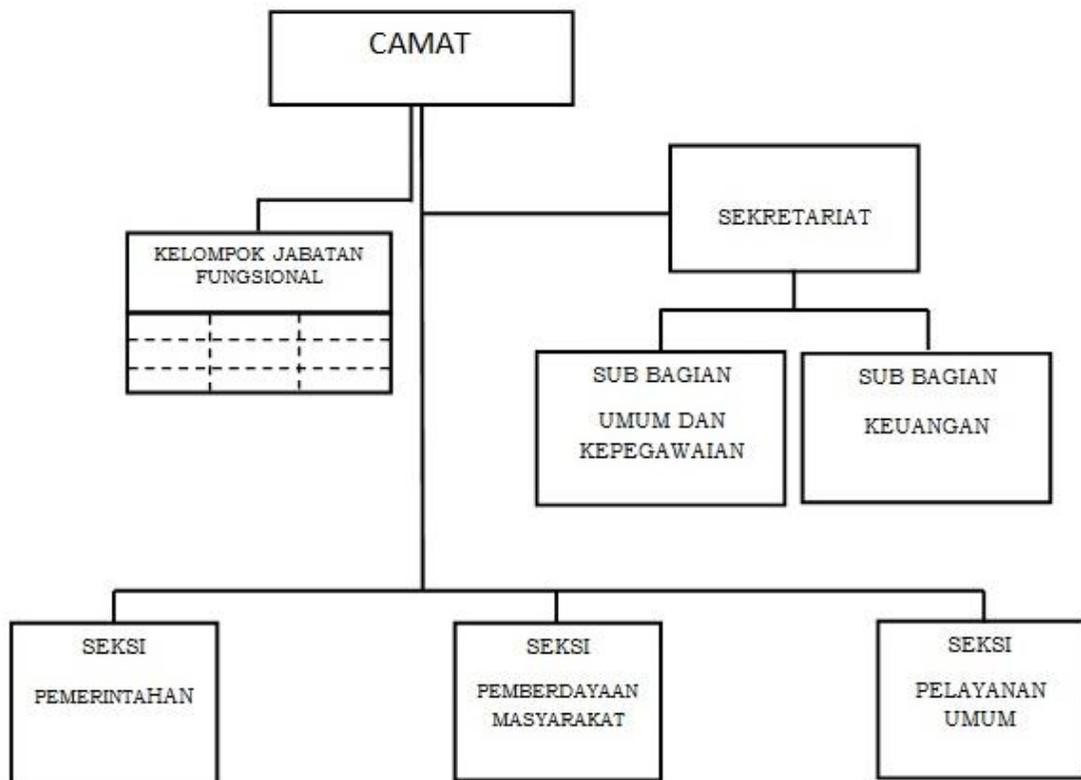
struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukodono menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
  - a. Subbag Umum
  - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada, antara lain tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

**GAMBAR 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono**



### **Tugas Pokok Camat**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
9. Melakukan administrasi barang milik daerah
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

### **Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Perubahan Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)

5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **Tugas Pokok Seksi Pemerintahan**

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan

12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Renacana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

#### **Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan di wilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan

14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 62.298 jiwa yang tersebar di 10 Desa. Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (Sepuluh) desa, yaitu:

1. Desa Klanting
2. Desa Kutorenon
3. Desa Bondoyudo
4. Desa Selokgondang
5. Desa Dawuhan Lor
6. Desa Selok Besuki
7. Desa Kebonagung
8. Desa Uranggantung
9. Desa Sumberejo
10. Desa Karang Sari

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

### 1) Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Sukodono ada 32 orang terdiri 14 PNS dan 18 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKODONO**  
**BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM. 19771023 200501 1 009	L	Camat
2	AGUS SETYAWAN, SE 19651121 199302 1 003	L	Sekretaris Kecamatan
3	ALI WAFAB 19660804 199202 1 004	L	Kepala Seksi Pelayanan Umum
4	NURCHOTIB 19670424 199202 1 002	L	Kepala Seksi Pemberdayaan Masy
5	SAIFUL ANAM, S.AP 19790629 200801 1 012	L	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
6	DEWI AFRILIYANTI, SE 19790415 201001 2 014	P	Kasubag Keuangan
7	ROMAWATI BIANA, S.Sos 19820623 201101 2 015	L	Pengadministrasi Umum
8	GANGSAR 19740714 200701 1 028	L	Pengadministrasi Umum
9	IRMA HARI NOVIANSYAH 19801110 200801 1 017	L	Pengadministrasi Umum
10	WIYONO 19660912 200701 1 032	L	Pengadministrasi Umum
11	ENDRO KARTIKO 19670515 200901 1 003	L	Pengadministrasi Umum
12	BUNALI 19861108 201001 1 001	L	Pengadministrasi Keuangan
13	HERU PRIBADI 19811126 201001 1 002	L	Pramu Kebersihan
14	ERMIN SUSILOWATI, SE 427092 19710403 2 001	P	Pelayanan Umum Kecamatan
15	HANIFAH 427092 19690214 2 001	P	Fasilitasi dan Koordinasi PM
16	EKO WAHYUDI 427092 19760817 1 001	L	Pelayanan Umum Kecamatan
17	YUDHA GALIH K, SE 427092 19920602 1 001	L	Pengadministrasi Keuangan
18	CATUR PUTRI H, SE 427092 19920503 2 001	P	Administrasi Umum dan Kepegawaian
19	MUCHAMAD ZAINUR R 427092 19970122 1 001	L	Administrasi Umum dan Kepegawaian
20	DENI MUCHAMMAD N, S.Pd 427092 19911229 1 001	L	Petugas Kebersihan
21	ZULFICKAR AURIZKI, SE 427060 19880315 1 001	L	Koordinator Kecamatan
22	AMIR ZAQI, SE 427092 19781204 1 001	L	Pendamping Desa Uranggantung
23	RIXMA HERMANTRY, SE 427092 19851124 2 001	P	Pendamping Desa Selokgondang

NO	NAMA	L/P	JABATAN
24	INSIYAH, SE 427092 19760422 2 001	P	Pendamping Desa Bondoyudo
25	NURMALA ZULISTYANI, SE 427092 19730707 2 001	P	Pendamping Desa Selokbesuki
26	HUDAIBIYAH, SE 427092 19830417 2 001	P	Pendamping Desa Kutorenon
27	RIZQI NOVIANDIKA, SE 427092 19851107 2 001	P	Pendamping Desa Dawuhan Lor
28	HOLIFAH 427092 19820514 2 001	P	Pendamping Desa Karang Sari
29	GEMINI DWI YANTI, SE 427092 19760522 2 001	P	Pendamping Desa Kebonagung
30	RIA PRIHATINI, S.EI 427093 19860109 2 001	P	Pendamping Desa Klanting
31	YENI LIA RACHMAWATI, SPd 427092 19880303 2 001	P	Pendamping Desa Sumberejo

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sukodono, data diolah 2023

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 14 (empat belas) orang PNS di Kantor Kecamatan Sukodono dengan komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**Pegawai Pada Kecamatan Sukodono**  
**Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang**  
**Tahun 2023**

No.	Nama	L	P	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	2		2 orang
2	Penata Tk. I (III/d )	2		2 orang
3	Penata	1		1 orang
4	Penata Muda Muda Tk. I (III/b)		1	1 orang
5	Penata Muda (III/a)	2		2 orang
6	Pengatur Tk. I ( II/d )	2		2 orang
7	Juru Tingkat I (I/d)	2		2 orang
8	Juru (I/c)	1		1 orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>14 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2023

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**TABEL 2.3**  
**Pegawai Pada Kecamatan Sukodono**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2023**

No.	Nama	Jumlah
1.	Sarjana ( S-2 )	1 orang
2.	Sarjana ( S-1)	15 orang
3.	Sarjana Muda/Diploma	4 orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	11 orang
5.	SLTP/MTs./Sederajat	1 orang
6.	SD/MI/Sederajat	0 orang
<b>Jumlah</b>		<b>32 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2023*

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 3 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 3 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Sukodono berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permendagri Nomor 18 tahun 2021, pada unit kerja setingkat eselon III/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kecamatan Sukodono tahun 2023.

Untuk mengetahui target apa yang telah dicapai di lima tahun yang lalu sebagai acuan untuk mencapai target lima tahun yang akan datang bisa kita lihat pada Tabel T-C.23 dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG**  
**Tahun 2019 - 2023**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai IKM Kecamatan		√		78,50	78,70	78,90	82,50	82,50	79,50	80,94	78,90	83,34	83,38	101,27	102,85	100,00	101,02	101,07
2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			√	88,00	89,00	90,00	92,00	93,00	94,18	96,72	90,00	72,00	38,00	107,02	108,67	100,00	78,26	40,86
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			√	96,60	96,60	96,60	84,00	90,00	53,33	100,00	96,60	66,00	33,00	55,21	103,52	100,00	78,57	36,67

**Tabel 2.5**  
**T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	1.434.718.909	1.471.820.396	1.170.332.037	1.445.887.056	1.558.321.265	1.410.461.404	1.462.792.334	1.163.782.711	1.423.820.239	315.201.063	98,31	99,39	99,44	98,47	20,23	8,62	(77,65)
Belanja Barang	850.848.000	570.281.047	578.877.955	533.664.000	817.712.192	841.278.777	566.603.527	570.662.575	271.978.556	131.161.223	98,88	99,36	98,58	50,96	16,04	(3,89)	(84,41)
Belanja Modal	133.650.000	-	-	-	83.788.076	133.450.000	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	(37,31)	(100,00)
JUMLAH	2.419.216.909	2.042.101.443	1.749.209.992	1.979.551.056	2.459.821.533	2.385.190.181	2.029.395.861	1.734.445.286	1.695.798.795	446.362.286							

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Tabel T-C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang periode tahun 2018-2023:
  - a. Indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung naik dan sesuai dengan target.
  - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti naik turun dari tahun ke tahun dari target yang telah ditentukan.
  - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu naik turun dari tahun ke tahun dari target yang telah ditentukan.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah kecamatan sukodono periode tahun 2019-2023, setiap program dan kegiatan rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai table T-C.24.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Sukodono menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang –kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan–pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang– undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- h. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Kelompok sasaran layanan dari Kecamatan Sukodono yaitu Masyarakat di 10 Desa yang ada di Kecamatan Sukodono.

#### **2.5. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN**

Selain menjadi kelompok sasaran layanan dari Kecamatan Sukodono Polsek, Koramil, Korwil Dinas Pendidikan, UPT Puskesmas, UPT Pertanian, Korwil Dinas PUTR dan KUA Kecamatan Sukodono juga menjadi mitra dalam pemberian layanan terutama kepada masyarakat Kecamatan Sukodono. Dengan adanya sinergitas yang baik pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewenangan dari Kecamatan Sukodono dapat terlaksana dengan baik.

#### **2.6. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono antara lain PDAM Tirta Mahameru dan Perumda Bank Pasar. Dengan adanya sinergitas yang baik pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

#### **2.7. KERJASAMA PERANGKAT DAERAH**

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono tidak terdapat kerjasama dengan Pihak Ketiga/Lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah.

**3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa laLu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Penentuan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh perangkat daerah Kecamatan Sukodono yaitu Pelaksanaan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa masih kurang maksimal. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

**a) Masalah**

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pemberian legalisasi, rekomendasi dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan.
2. Masih adanya desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu.
3. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

**b. Akar Masalah**

1. Kurang optimalnya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras pelayanan publik di Kecamatan Sukodono.

3. Mekanisme pemerintahan desa belum dilaksanakan secara optimal.
4. Kurangnya pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan Perundang-undangan.
5. Pembinaan pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi.

Berdasarkan uraian diatas, masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan kinerja dan indikator dapat dilihat pada table T-B.35 sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**T-B 35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KECAMATAN SUKODONO - KABUPATEN LUMAJANG**

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran Kecamatan Sukodono dalam melakukan pendampingan terhadap kinerja pemerintahan desa dan sosialisasi baik dalam urusan pelayanan public, adminitrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pemberian legalisasi, rekomendasi dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan	Kurang optimalnya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras pelayanan publik di kecamatan Sukodono
		Masih adanya desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu	Mekanisme pemerintahan desa belum dilaksanakan secara optimal
			Kurangnya pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
		Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	
	Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat		Pembinaan pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi

### **3.4 ISU STRATEGIS**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- 1) Pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan Sukodono terhadap kinerja pemerintahan desa belum dilaksanakan secara berkesinambungan, hal ini dikarenakan terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sukodono;
- 2) Belum optimalnya Kecamatan Sukodono dalam pemanfaatan media social untuk melakukan sosialisasi dan publikasi baik yang berkaitan dengan pelayanan administrasi maupun pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sukodono yang berkaitan dengan masyarakat.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemerintah karena belum terfasilitasi secara maksimal.

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Sukodono dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Sukodono mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran adalah ***Indek Pelayanan Publik***.

Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.

2. Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Adapun yang menjadi indikator tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukodono beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indek Pelayanan Publik	angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	60.02 (B-)	72.03 (B)	80.05 (A-)
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$	80,77%	81,48%	82,46%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100$	90,00%	93,33%	100,00%

#### 4.2. CASHCADING KINERJA KECAMATAN SUKODONO

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indek Pelayanan Publik				
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<b>7.01.01</b>	<b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>
			<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>
			7.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			7.01.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			7.01.01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			7.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			7.01.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
			7.01.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			7.01.01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			7.01.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			7.01.01.2.02.06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			7.01.01.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>
			7.01.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			7.01.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			7.01.01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>
			7.01.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			7.01.01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			7.01.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			7.01.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			7.01.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
			7.01.01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			7.01.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>
			7.01.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>
			7.01.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			7.01.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			7.01.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Terpenuhinya an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>
			7.01.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			7.01.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			7.01.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			<b>7.01.02</b>	<b>Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>
			<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Terlaksanakanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>
			7.01.02.2.01.02	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Terlaksanakanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
			7.01.02.2.04.03	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			<b>7.01.03</b>	<b>Terlaksanakanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>
			<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Terlaksanakanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>
			7.01.03.2.01.01	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			7.01.03.2.01.02	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			7.01.03.2.01.03	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			7.01.03.2.06.03	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
			7.01.03.2.06.06	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
			7.01.03.2.06.07	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			7.01.03.2.06.08	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
			7.01.03.2.06.12	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			<b>7.01.05</b>	<b>Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
			<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
			7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			7.01.04.2.01.02	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			<b>7.01.05</b>	<b>Terlaksanakannya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
			<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Terlaksanakannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
			7.01.05.2.01.08	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<b>7.01.06</b>	<b>Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu
			7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu
						Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu
						Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu
			7.01.06.2.01.02	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			7.01.06.2.01.03	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			7.01.06.2.01.06	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Akhir RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Sukodono serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Tahun 2023-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

#### **5.1 Strategi**

- a. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono antara lain :

1. Peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administasi pelayanan kecamatan;
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender;
7. Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan Desa;
8. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait tertib administrasi pemerintahan Desa.

**Tabel 5.1**  
**T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
			Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan	
			Peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan	
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait tertib administrasi pemerintahan Desa	Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa	Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait tertib administrasi pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa	Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan Desa
			Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait tertib administrasi pemerintahan Desa	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala

**6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sukodono selama 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sukodono. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program/kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1****Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
<b>7.01.05</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
<b>7.01.05</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**Tabel 6.2**  
**T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti  _ x100 Jumlah fasilitasi dan Koordinasi	72%	80,77%	2.371.367.078	81,48%	2.588.221.286	82,46%	4.052.410.982	82,46%	9.029.744.346	Sekretariat, Kasi Pemberdayaan, dan Kasi Pelayanan Umum	Kec. Sukodono
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)  _ x100 (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 dokumen adminisrasi pemerintahan desa)	66%	40,00%	235.850.000	40,00%	259.435.000	46,67%	324.293.750	46,67%	819.578.750	Seksi Pemerintahan	Kec. Sukodono

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dapat dipenuhi  _ x100 Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan	100%	100%	2.108.867.078	100%	2.307.353.786	100%	2.860.660.982	100%	7.276.881.846	Sekretariat Kecamatan	Kec. Sukodono
7.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitas Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi  _ x100 Jumlah fasilitas Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan	100%	100%	11.500.000	100%	12.650.000	100%	15.812.500	100%	39.962.500	Kasubbag. Keuangan	Kec. Sukodono
7.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.200.000	2 Dokumen	2.750.000	7 Dokumen	6.950.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.950.000		
7.01.01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.200.000	2 Dokumen	2.750.000	6 Dokumen	6.950.000		
7.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000	5 Laporan	2.750.000	5 Laporan	3.437.500	15 Laporan	8.687.500		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.300.000	12 Laporan	4.125.000	36 Laporan	10.425.000		
7.01.01.2.02	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana  _ x100 Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	100%	100%	1.574.849.281	100%	1.732.334.209	100%	2.165.417.761	100%	5.472.601.251	Kasubbag. Keuangan	Kec. Sukodono
7.01.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Jumlah ASN yang terlayani Gaji dan Tunjangan	14 Orang / 12 Bulan	14 Orang / 12 Bulan	1.538.637.281	14 Orang / 12 Bulan	1.692.501.009	14 Orang / 12 Bulan	2.115.626.261	14 Orang / 12 Bulan	5.346.764.551		
7.01.01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN yang terfasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	31.212.000	12 Dokumen	34.333.200	12 Dokumen	42.916.500	36 Dokumen	108.461.700		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.200.000	4 Laporan	2.750.000	12 dokumen	6.950.000		
7.01.01.2.02.06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.100.000	2 dokumen	1.375.000	6 dokumen	3.475.000		
7.01.01.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	-	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.200.000	12 Laporan	2.750.000	36 Laporan	6.950.000		
7.01.01.2.03	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi BMD yang terlaksana  _x100 Jumlah fasilitasi Administrasi BMD yang direncanakan	100%	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	6.875.000	100%	17.375.000	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	-	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.650.000	2 dokumen	2.062.500	6 dokumen	5.212.500		
7.01.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	-	7 Laporan	2.000.000	7 Laporan	2.200.000	7 Laporan	2.750.000	21 laporan	6.950.000		
7.01.01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	-	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.650.000	12 Laporan	2.062.500	36 laporan	5.212.500		
7.01.01.2.05	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana  _x100 Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan	100%	100%	8.750.000	100%	9.625.000	-	-	100%	18.375.000	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono
7.01.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	-	1 Paket	8.750.000	1 Paket	9.625.000	-	-	2 paket	18.375.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.06	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	%	Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana  x 100 Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan	100%	100%	45.371.047	100%	49.908.152	100%	62.385.190	100%	157.664.388	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono
7.01.01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3.033.000	1 Paket	3.336.300	1 Paket	4.170.375	3 paket	10.539.675		
7.01.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	4 paket	25.926.409	4 paket	28.519.050	4 paket	35.648.812	12 paket	90.094.271		
7.01.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	5.011.638	2 paket	5.512.802	2 paket	6.891.002	6 paket	17.415.442		
7.01.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	-	1 paket	1.500.000	1 paket	1.650.000	1 paket	2.062.500	3 paket	5.212.500		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.100.000	12 Laporan	1.375.000	36 laporan	10.425.000		
7.01.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.900.000	12 Laporan	9.790.000	12 Laporan	12.237.500	36 laporan	30.927.500		
7.01.01.2.07	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana  x 100 Jumlah Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan	100%	100%	34.000.000	100%	25.000.000	100%	17.000.000	100%	76.000.000	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono
7.01.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	34.000.000	3 Unit	25.000.000	6 Unit	17.000.000	14 unit	76.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.08	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terlaksana  _x100 Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan	100%	100%	224.952.000	100%	247.447.200	100%	309.309.000	100%	781.708.200	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono
7.01.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	12 Laporan	1.320.000	12 Laporan	1.650.000	36 laporan	4.170.000		
7.01.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah rekening yang dibayar	12 Laporan	12 Laporan	49.800.000	12 Laporan	54.780.000	12 Laporan	68.475.000	36 laporan	173.055.000		
7.01.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana	12 Laporan	12 Laporan	173.952.000	12 Laporan	191.347.200	12 Laporan	239.184.000	36 laporan	604.483.200		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.09	Terpenuhinya an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	%	Jumlah fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan  _x 100 Jumlah fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	100%	100%	204.444.750	100%	224.889.225	100%	281.111.531	100%	710.445.506	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kec. Sukodono
7.01.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	6 unit	6 unit	34.944.750	6 unit	38.439.225	6 unit	48.049.031	6 unit	121.433.006		
7.01.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	33 unit	30 Unit	19.500.000	30 Unit	21.450.000	30 Unit	26.812.500	30 Unit	67.762.500		
7.01.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	150.000.000	-	165.000.000	-	206.250.000	1 Unit	521.250.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat}} \times 100$	79,5%	100%	8.000.000	100%	8.800.000	100%	11.000.000	100%	27.800.000	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Sukodono
7.01.02.2.01	Terlaksanakanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{100Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang direncanakan}} \times 100$	79,5%	100,0%	4.500.000	100,0%	4.950.000	100,0%	6.187.500	100,0%	15.637.500	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Sukodono
7.01.02.2.01.02	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.950.000	3 Dokumen	6.187.500	9 dokumen	15.637.500		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02.2.04	Terlaksanakannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan  _____x 100 Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan	79,5%	100,0%	3.500.000	100,0%	3.850.000	100,0%	4.812.500	100,0%	12.162.500	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Sukodono
7.01.02.2.04.03	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.850.000	12 Laporan	4.812.500	36 laporan	12.162.500		
7.01.03	Terlaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan)  _____2	79,2%	100	224.000.000	100	246.400.000	100	1.148.675.000	100	1.619.075.000	Kasi Pemberdayaan	Kec. Sukodono

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03.2.01	Terlaksanakannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan  ----- x 100 jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan	79,2%	100%	165.580.000	100%	182.138.000	100%	1.068.347.500	100%	1.416.065.500	Kasi Pemberdayaan	Kec. Sukodono
7.01.03.2.01.01	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	844.800.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	851.100.000		
7.01.03.2.01.02	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.700.000	1 dokumen	9.625.000	3 dokumen	24.325.000		
7.01.03.2.01.03	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	155.580.000	8 Laporan	171.138.000	8 Laporan	213.922.500	24 laporan	540.640.500		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03.2.06	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	%	jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan  ----- x 100 jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan	79,5%	100%	58.420.000	100%	64.262.000	100%	80.327.500	100%	203.009.500	Kasi Pemberdayaan	Kec. Sukodono
7.01.03.2.06.01	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	N/A	170 Keluarga	32.900.000	170 Keluarga	36.190.000	170 Keluarga	45.237.500	150 Keluarga	114.327.500		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03. 2.06.03	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	6.500.000	50 Keluarga	7.150.000	50 Keluarga	8.937.500	150 Keluarga	22.587.500		
7.01.03. 2.06.06	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	20 Keluarga	10.040.000	20 Keluarga	11.044.000	20 Keluarga	13.805.000	60 Keluarga	34.889.000		
7.01.03. 2.06.07	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	60 Keluarga	5.950.000	60 Keluarga	6.545.000	60 Keluarga	8.181.250	180 Keluarga	20.676.250		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03. 2.06.08	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	20 Keluarga	7.930.000	20 Keluarga	8.723.000	20 Keluarga	10.903.750	60 Keluarga	27.556.750		
7.01.03. 2.06.12	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	170 Keluarga	28.000.000	170 Keluarga	30.800.000	170 Keluarga	38.500.000	510 Keluarga	97.300.000		
7.01.05	Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan  x 100 Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan	79,5%	100%	23.300.000	100%	25.630.000	100%	32.037.500	100%	80.967.500	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04.2.01	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	23.300.000	2 Fasilitasi	25.630.000	2 Fasilitasi	32.037.500	6 fasilitas	80.967.500	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono
7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	19.500.000	1 Laporan	21.450.000	1 Laporan	26.812.500	3 laporan	67.762.500		
7.01.04.2.01.02	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang disusun	1 Laporan	2 Laporan	3.800.000	2 Laporan	4.180.000	2 Laporan	5.225.000	6 laporan	13.205.000		
7.01.05	Terlaksanakanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan  ----- x 100 Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan	79,5%	100%	7.200.000	100%	37.500	100%	37.500	100%	25.020.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05.2.01	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- x 100 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan	1 Fasilitas	1 Fasilitas	7.200.000	1 Fasilitas	3.750.000	1 Fasilitas	3.750.000	3 fasilitas	25.020.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono
7.01.05.2.01.08	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah dokumen tugas Forkopimcam yang difasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000	12 Dokumen	7.920.000	12 Dokumen	9.900.000	36 Dokumen	25.020.000		
7.01.06	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu ----- x 100 Jumlah Desa	79,5%	10%	235.850.000	10%	259.435.000	10%	324.293.750	30%	819.578.750	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu ----- x 100 Jumlah Desa	79,5%	10%		10%		10%		30%			
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu ----- x 100 Jumlah Desa	79,5%	100%		100%		100%		100%			

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	10 Desa	1 Desa	235.850.000	1 Desa	259.435.000	2 Desa	324.293.750	3 Desa	819.578.750	Kasi Pemerintahan	Kec. Sukodono
			Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	Desa	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	10 Desa	1 Desa		1 Desa		2 Desa		3 Desa			
			Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Desa	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	10 Desa	10 Desa		10 Desa		10 Desa		10 Desa			
7.01.06.2.01.02	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang disusun	3 Dokumen	5 Dokumen	19.200.000	5 Dokumen	21.120.000	5 Dokumen	26.400.000	15 Dokumen	66.720.000		
7.01.06.2.01.03	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disusun	-	12 Dokumen	216.650.000	12 Dokumen	177.455.000	12 Dokumen	221.818.750	36 Dokumen	615.923.750		
7.01.06.2.01.06	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disusun	-	-	-	10 Dokumen	60.860.000	-	76.075.000	10 Dokumen	136.935.000		

**7.1 PENENTUAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Kecamatan Sukodono secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024-2026. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.

Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP), dengan target kinerja sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2024 sebesar 60,02
- b. Pada tahun 2025 sebesar 72,03
- c. Pada tahun 2026 sebesar 80,05

Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target Kinerja Sasaran selama 3 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2024 sebesar 80,77 %
- b. Pada tahun 2025 sebesar 81,48 %
- c. Pada tahun 2026 sebesar 82,46 %

2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Target Kinerja Sasaran selama 3 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2024 sebesar 90,00 %
- b. Pada tahun 2025 sebesar 93,33 %
- c. Pada tahun 2026 sebesar 100,00 %

## **7.2 PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat maka target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Sukodono yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD**  
**Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

No	Tujuan/Sasaran/Program Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%)
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	-	60.02 (B-)	72.03 (B)	80.05 (A-)	80,05 (A-)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100 Jumlah fasilitasi dan koordinasi	72%	80,77%	81,48%	82,46%	82,46%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat dipenuhi ----- x 100 Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	Jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan ----- x 100 Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat	79,5%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/Sasaran/Program Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%)
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan) ----- 2	79,5%	100%	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan ----- x 100 Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan	79,5%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- x 100 Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan	79,5%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu ----- x 100 (Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)	66%	90,00%	93,33%	100,00%	100,00%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu ----- x 100 Jumlah Desa	79,5%	70%	80%	100%	100%

No	Tujuan/Sasaran/Program Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%)
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	79,5%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	79,5%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukodono tahun 2024-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Lumajang, untuk pembangunan daerah 3 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukodono.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukodono ini kami harapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Sukodono yang merupakan break down dari RPD Kabupaten Lumajang.

Sukodono, Mei 2023

CAMAT SUKODONO



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**

NIP. 19771023 200501 1 009